

Penuh Kritik, LPj Bupati Tetap Diterima

● **Opini WDP Diungkit**

DEMAK - Rapat paripurna pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak 2012, Kamis (11/7), diwarnai kritikan mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Meski begitu, empat komisi dan fraksi-fraksi DPRD menyatakan menerima laporan pertanggungjawaban (LPj) Bupati.

Opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat sorotan tajam. Komisi D, misalnya, meminta Pemkab agar lebih intensif melakukan pembinaan terkait pelaporan kegiatan sebelum LHP diperiksa BPK.

"Pembinaan ini sangat perlu agar tidak terjadi keterlambatan pelaporan saat pemeriksaan. Diharapkan, target memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian bisa dicapai," ujar Ketua Komisi D DPRD Demak, Nurul Muttaqin.

Hal senada dilontarkan Komisi A, yang mengharapkan opini WDP tersebut bisa ditingkatkan menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP). Kinerja pegawai di lingkungan

Pemkab Demak pun diminta dimaksimalkan dengan mengadakan pelatihan peningkatan sumber daya manusia.

Harus Terpasang

Adapun Komisi C melontarkan kritik terhadap pemasangan papan nama dalam setiap program kegiatan yang dijalankan rekanan. Hal itu untuk memudahkan dalam hal pengawasan dan transparansi kepada masyarakat.

"Papan nama kegiatan tersebut harus terpasang sebelum mengerjakan proyek. Masyarakat dapat mengetahui asal anggaran, jumlah maupun waktu pengerjaan kegiatan," kata Ketua Komisi C, S Fahrudin Bisri Slamet.

Secara keseluruhan DPRD menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2012 untuk ditetapkan menjadi Perda. (J9-64)